
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP mencerminkan pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis seperti yang tertuang dalam Renstra. LAKIP disusun berdasarkan siklus satu tahun anggaran dengan membandingkan perencanaan dengan hasil. LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menjalankan program dan kegiatan selama satu tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugasnya dalam menghasilkan berbagai dokumen perencanaan yang menjadi kewenangannya yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) termasuk juga menghasilkan dokumen perencanaan penganggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain sebagai lembaga yang berwenang dalam perencanaan, Bappeda juga menjalankan fungsinya sebagai koordinator bagi setiap SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam perencanaan pembangunan, sehingga produk perencanaan perencanaan yang dihasilkan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan LAKIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2011 memenuhi kaidah seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini

nantinya menjadi dasar penilaian bagi Kepala Daerah dalam mengevaluasi Kinerja instansi dibawahnya selama satu tahun anggaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pada Penyusunan LAKIP ini adalah untuk memberikan gambaran secara spesifik pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui keefektifan fungsi perencanaan yang dijalankan Bappeda.

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

1. sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bappeda
2. sebagai bahan evaluasi keberhasilan Bappeda dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor : 2 Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan. Dengan tupoksi tersebut Bappeda mempunyai wewenang mengkoordinir penyusunan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan dengan didukung oleh SKPD lainnya dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selama menjalankan fungsi tersebut Bappeda telah menghasilkan dokumen perencanaan untuk jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), jangka pendek (tahunan). Untuk menjalankan dokumen perencanaan yang telah dihasilkan, maka Bappeda juga diberi tugas untuk menyusun perencanaan penganggaran seperti Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang menjadi dasar bagi SKPD teknis untuk menentukan program dan batasan plafon yang dapat dianggarkan. Penyusunan dan penetapan kebijakan dan prioritas anggaran yang tepat diperlukan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan didukung dengan pendanaan yang memadai.

Untuk mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan, maka Bappeda selaku pembantu Walikota diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah

seperti yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai lembaga dengan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup perencanaan pembangunan daerah.
- b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berjalannya suatu organisasi atau instansi sangat didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penempatan pegawai tanpa memperhatikan kebutuhan organisasi akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Jumlah pegawai yang berlebih dari yang dibutuhkan akan mengakibatkan rendahnya kinerja organisasi karena banyak pegawai yang tidak bekerja menjalankan fungsinya, demikian juga jika jumlah pegawai yang ditempatkan kurang dari yang dibutuhkan akan mengakibatkan berlebihnya beban kerja yang dipikul oleh pegawai yang bersangkutan sehingga akan menimbulkan kejenuhan. Sehingga diperlukan suatu *assesment* mengenai kebutuhan pegawai ideal dalam organisasi. Organisasi yang efektif harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam penguasaan bidang kerja yang digeluti, mudah menerima setiap inovasi, mampu bekerja secara tim dan mampu menganalisa berbagai persoalan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja, Bappeda telah menjalankan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Penguasaan teknologi informasi sekarang ini menjadi suatu tuntutan untuk dipenuhi dalam organisasi. Makin beragamnya jenis pekerjaan yang dijalankan makin besar pula tuntutan kemampuan penguasaan teknologi. Penggunaan teknologi dapat menciptakan efisien waktu dan finansial, sehingga dapat memunculkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kerja.

Sebagai lembaga yang diberi wewenang dalam bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Banda Aceh didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Dalam usaha peningkatan kapasitas kelembagaan, Bappeda telah mengikutsertakan para pegawainya dalam beberapa training yang berkaitan dengan fungsi Bappeda. Disamping itu juga ikut serta dalam training yang berbasis teknologi informasi.

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Gol.	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	3	-	3	
3	IV/a	3	2	5	
4	III/d	7	10	17	
5	III/c	-	2	2	
6	III/b	6	9	15	
7	III/a	4	4	8	
8	II/d	1	-	1	
9	II/c	-	-	0	
10	II/b	1	-	1	
11	II/a	1	1	2	
12	I/c	1	-	1	
	Jumlah PNS	28	28	56	

Berdasarkan tabel 1.1. diatas dapat dilihat kekuatan sumber daya manusia Bappeda Kota Banda Aceh berjumlah 56 orang pegawai, terdiri dari 28 orang PNS laki-laki dan 28 orang PNS perempuan. Jumlah terbesar PNS pada golongan III/d sebanyak 17 orang, diikuti golongan III/b sebanyak 15 orang.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1

No.	Jabatan	Jumlah orang
3	Kepala Bidang	4
4	Kasubbag	3
5	Kasubbid	8
	Jumlah	17

Berdasarkan tabel 1.2. diatas dapat dilihat jumlah eselonering di Bappeda Kota Banda Aceh berjumlah 17 jabatan terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag. dan Kasubbid.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Bappeda Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	11
2	S 1	40
3	D III	1
4	SMA	3
5	SMP	1
	Jumlah	56

Berdasarkan tabel 1.3. diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 40 orang, diikuti oleh tingkat S2 sebanyak 11 orang, SMA sebanyak 3 orang, DIII 1 orang dan SMP 1 orang.

Tabel 1.4
Perbandingan Pegawai Aparatur Perencana Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan			Jumlah	%
	Diploma	S1	S2		
Sosial	0	6	0	6	10,71
Administrasi Negara		2		2	3,57
Sosiatri		1		1	1,79
Pemerintahan		1		1	1,79
Kesejahteraan Sosial		1		1	1,79
Sosial Terapan		1		1	1,79
Ekonomi	0	12	5	17	30,36
Akuntansi		4		4	7,14

Latar Belakang Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan			Jumlah	%
	Diploma	S1	S2		
Manajemen		4	2	6	10,71
Ekonomi Pembangunan		4	3	7	12,50
Teknik	1	11	5	17	30,36
Sipil		7	1	8	14,29
Arsitektur		1		1	1,79
Lingkungan			1	1	1,79
Jalan Raya			1	1	1,79
Informatika		1		1	1,79
Perenc. Wilayah dan Kota		1	1	2	3,57
Manajemen Prasarana			1	1	1,79
Konstruksi		1		1	1,79
Manajemen Informatika Komputer	1			1	1,79
Pertanian/Peternakan	0	6	0	6	10,71
Sosial Ekonomi Pertanian		3		3	5,36
Hama & Penyakit Tanaman		1		1	1,79
Agronomi		2		2	3,57
Hukum	0	2	0	2	3,57
Tata Negara		1		1	1,79
Perdata		1		1	1,79
Kedokteran	0	1	0	1	1,79
Dokter Hewan		1		1	1,79
Pendidikan	0	1	1	2	3,57
Manajemen Pendidikan			1	1	1,79
Pendidikan Luar Sekolah		1		1	1,79
MIPA	0	1	0	1	1,79
Matematika		1		1	1,79
SMA				3	5,36
SMP				1	1,79
Jumlah	1	40	11	56	100,00

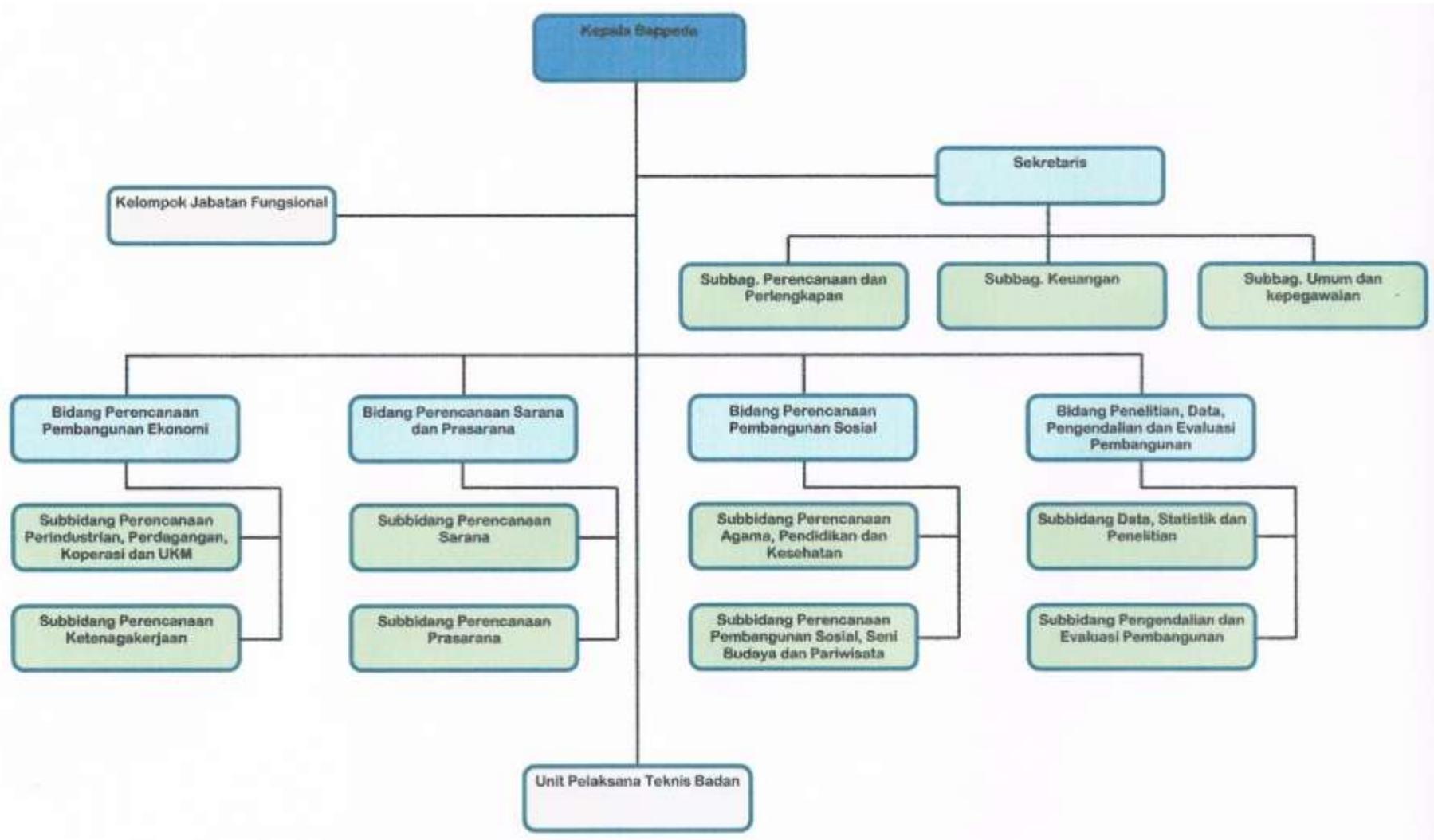
Berdasarkan tabel 1.4. diatas dapat dilihat bahwa potensi SDM Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak diisi oleh pegawai berkualifikasi pendidikan S1 40 orang, diikuti oleh kualifikasi S2 11 orang dan terakhir kualifikasi Diploma 1 orang. Dari total pegawai dengan kualifikasi dari Diploma sampai S2 terlihat

bahwa kedepan Bappeda harus dapat meningkatkan kualitas aparatur dengan kualifikasi S2 dalam kuantitas yang memadai.

1.4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- Kepala Badan
- Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi :
 - Sub Bidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - Sub Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan
- Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - Sub Bidang Perencanaan Sarana
 - Sub Bidang Perencanaan Prasarana
- Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, membawahi :
 - Sub Bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata
- Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi :
 - Sub Bidang Data, Statistik dan Penelitian
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



1.5. Sarana dan Prasarana

Beban kerja yang tinggi perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai dari kuantitas maupun kualitas. Sarana dan prasarana yang mencukupi akan mendorong percepatan pelaksanaan tugas Bappeda selesai tepat waktu seperti yang direncanakan. Selain itu kualitas juga memegang peranan penting mendukung tugas Bappeda.

Tugas-tugas yang dijalankan Bappeda sekarang ini semakin kompleks dan memerlukan dukungan peralatan dengan teknologi yang mengikuti perkembangan. Terutama yang berkenaan dengan teknologi informasi seperti penggunaan internet, penggunaan peralatan pemetaan GPS dan Trimble.

Secara lebih lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 1.5
Daftar aset Bappeda Kota Banda Aceh

No.	Uraian	Volume	Keterangan
1	Tanah	1 unit	
2	Kendaraan dinas roda 4	2 unit	
3	Kendaraan dinas roda 2	7 unit	
4	Mesin Ketik	4 unit	
5	Mesin Hitung	8 unit	
6	Mesin photocopy	2 unit	
7	Mesin absensi	1 unit	
8	Almari	19 unit	
9	Filling Cabinet	24 unit	
10	White Board	4 unit	
11	AC	15 unit	
12	Kipas angin	5 unit	
13	Tangga darurat	1 unit	
14	Komputer	22 unit	
15	Note Book	8 unit	
16	Printer	25 unit	
17	Scanner	1 unit	
18	UPS/Stabilizer	2 unit	
19	Kelengkapan komputer	12 unit	
20	Jaringan komputer	4 unit	
21	Peta digital landmark Kota Banda Aceh	1 unit	
22	Meja kerja	87 unit	
23	Meja rapat	2 unit	
24	Kursi	170 unit	
25	Sofa	2 unit	
26	Podium	1 unit	
27	Dispenser	1 unit	
28	Kulkas	1 unit	
29	Jam dinding	6 unit	
30	Kamera	2 unit	

No.	Uraian	Volume	Keterangan
31	Handycam	1 unit	
32	Proyektor/infocus	2 unit	
33	Soundsystem	1 unit	
34	Alat studio lainnya	1 unit	
35	Telepon	11 unit	
36	Faximile	1 unit	
37	Interkom	5 unit	
38	GPS	5 unit	
39	Intalasi listrik	2 unit	
40	Instalasi telepon	Semua ruangan	
41	Peta	3 unit	
42	Lambang Garuda	1 unit	

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak yang berwenang membuat dan menerima LAKIP, serta pengguna LAKIP. Instansi yang harus dan berwenang membuat LAKIP adalah, Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.

Adapun mekanisme penulisan LAKIP adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pemimpin Departemen/LPND, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.
- b. LAKIP tahunan dari tiap Departemen/LPND, masing-masing Menteri/pemimpin LPND menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- c. LAKIP Tahunan dari setiap Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri

Dalam Negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang paN, dan Kepala BPKP.

- d. LAKIP tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri dalam Negeri, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Propinsi dan Kepala Perwakilan BPKP.
- e. Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap LAKIP dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- f. kepala LAN melakukan kajian dan penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerjanya, serta melaporkannya kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab dibidang PAN.

Sistematika Penulisan Lakip :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sarana dan Prasarana
- 1.6. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN STRATEJIK

- 2.1. Rencana Stratejik SKPD
- 2.2. Rencana Kerja Tahunan SKPD

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Indikator Kinerja
- 3.2. Capaian Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

-
1. Imagible (dapat dibayangkan)
 2. Desirable (menarik)
 3. Feasible (realistis dan dapat dicapai)
 4. Focused (jelas)
 5. Flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan)
 6. Communicable (mudah dipahami)

Berkaitan dengan organisasi pemerintahan, maka visi memiliki pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa maupun diarahkan agar dapat berkarya dan berkarya dan tetap eksis, konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi menggambarkan tantangan di masa depan yang berisikan citra dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kota Banda Aceh.

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas Visi Bappeda Kota Banda Aceh adalah :

“Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota yang Islami”.

Misi (*mission*) adalah apa sebabnya kita ada (*why we exist / what we believe we can do*). Di dalam misi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi, pasar yang dilayani dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut. Pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipenuhi oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan.

Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya.

Untuk dapat mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka harus dijabarkan kedalam bentuk misi-misi. Misi dalam organisasi pemerintahan adalah : suatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dengan merumuskan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengetahui atau mengenal keberadaan dan peranan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan statejik secara berkelanjutan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Adapun sasaran strategik yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Banda Aceh adalah :

1. Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya kualitas data/informasi pembangunan yang akurat
3. Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga
4. Meningkatnya kualitas program perencanaan
5. Meningkatnya kualitas program pembangunan ekonomi

4. Strategi

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategik dan kegiatan di Bappeda adalah :

1. Memantapkan profesionalisme aparatur melalui penyelenggaraan administrasi dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
3. Meningkatkan kualitas aparatur perencanaan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini
5. Mendorong keterlibatan dunia usaha/ lembaga dalam pembangunan
6. Membuka ruang partisipasi bagi kesamaan gender dan melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan
7. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat
8. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan secara terpadu, transparan, akuntabel dan cepat

-
9. Menghasilkan perencanaan pembangunan yang mendukung perkembangan perekonomian daerah

5. Kebijakan

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pencabutan Perpres No. 6 Tahun 1961 dan Penetapan Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
10. Qanun No. 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/179/I/BANGDA tanggal 31 Desember 2003 tentang Rencana Pelaksanaan Sistem Profil Daerah dan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.2. Rencana Kerja Tahunan SKPD

Pada tahun 2011 Bappeda Kota Banda Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai penjabaran pencapaian sasaran dan indikator kinerja, yaitu :

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

Indikator Kinerja :

- 1.1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, target kinerja 12 bulan.

-
- 1.2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana, target kinerja 12 bulan.
 - 1.3. Meningkatnya jumlah perbaikan sarana dan prasarana, target kinerja 12 bulan.
 - 1.4. Jumlah pakaian dinas harian pegawai, target kinerja 63 orang.
 - 1.5. Keikutsertaan dalam Diklat, target kinerja 12 bulan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - 1.8. Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang
 - 1.9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - 2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas data/informasi pembangunan yang akurat.

Indikator Kinerja :

- 2.1. Jumlah buku PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka, target kinerja 80 buku PDRB dan 80 buku Banda Aceh Dalam Angka.
- 2.2. Jumlah album data spasial di bidang perencanaan, target kinerja 2 eks. album peta.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pengembangan Data/Informasi

1.1. Penyusunan Buku PDRB & Banda Aceh dalam Angka

1.2. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga.

Indikator Kinerja :

3.1. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga, target kinerja 3 lembaga.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Kerjasama Pembangunan

1.1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

4. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya koordinasi dan musyawarah dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Indikator kinerja :

4.1. Terlaksananya koordinasi dan musyawarah, target kinerja 12 bulan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar

1.1. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang

5. Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kualitas program perencanaan.

Indikator kinerja :

6.1. Pelaksanaan musrenbang, target kinerja 200 orang.

6.2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi, target kinerja 25 buku laporan Monitoring, 25 buku laporan capaian RPJM.

6.3. Terciptanya sinkronisasi program pembangunan dan plafon anggaran SKPD, target kinerja 36 SKPD.

6.4. Pelaksanaan P2KP, target kinerja 90 desa.

6.5. Pelaksanaan Musrena, target kinerja 450 orang perempuan.

6.6. Pelaksanaan rapat kerja Pemerintah Kota Banda Aceh, target kinerja 36 SKPD.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1. Penyelenggaran Musrenbang RKPD

1.2. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.3. Penyusunan Kebijakan Umum APBD

1.4. Penunjang Pelaksanaan P2KP

1.5. Penyelenggaran Musrena

1.6. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh

6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas data IPM

Indikator kinerja :

6.1. Jumlah buku IPM, target kinerja 60 buku.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - 1.1. Penyusunan Buku Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh

2.3. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana telah kami perjanjikan dengan Walikota Banda Aceh didalam Penetapan tertanggal 14 November 2011 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Untuk mencapai sasaran strategis 1 maka indikator dan target pencapaian adalah ditetapkan sebagai berikut :

- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan disiplin PNS dan Non PNS, dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 661.479.127,-

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas data/informasi pembangunan yang akurat

Untuk mencapai sasaran strategis 2 maka indikator dan target pencapaian adalah ditetapkan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas data dan informasi ekonomi dan statistik, dan informasi data spatial. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 265.952.000,-.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga

Untuk mencapai sasaran strategis 3 maka indikator dan target pencapaian adalah ditetapkan sebagai berikut :

- Melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 107.278.909,-.

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya koordinasi dan musyawarah dalam penyelenggaraan penataan ruang

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan keterangan tentang ukuran input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan memudahkan dalam penilaian terhadap efektifitas pencapaian kinerja organisasi sehingga dapat diketahui apakah strategi yang dijalankan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Syarat-syarat indikator kinerja:

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif
3. Berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat maupun dampak.
4. Mempunyai efektifitas biaya yang tinggi
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan
6. Relevan; berhubungan secara langsung dan secara logis dengan tujuan, sasaran, strategi, dan fungsi.
7. Efektif; datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis, dengan biaya yang tersedia.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda umumnya menggunakan dana dan Sumber Daya Manusia sebagai indikator masukan. Sedangkan indikator keluaran dan hasil tergantung dari bermacam kegiatan yang dilaksanakan. Satuan indikator kinerja dapat berupa rupiah, orang, persentase atau set.

Penerapan fungsi perencanaan pembangunan Bappeda dapat dilihat pada indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang bidang perencanaan. Indikator tersebut adalah :

- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

-
- Jumlah buku profil Kota Banda Aceh
 - Jumlah buku PDRB dan Banda Aceh dalam Angka
 - Jumlah album data spasial di bidang perencanaan
 - Pelaksanaan kerjasama antar lembaga
 - Jumlah dokumen RPJPD
 - Jumlah dokumen RPJMD
 - Pelaksanaan musrenbang
 - Jumlah dokumen RKPD
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi
 - Jumlah dokumen KUA dan PPAS
 - Pelaksanaan Musrena
 - Pelaksanaan P2KP
 - Pelaksanaan rapat kerja Pemerintah Kota Banda Aceh
 - Pelaksanaan pameran pembangunan
 - Jumlah dokumen RPIJM
 - Jumlah dokumen rencana pengembangan ekonomi kelautan daerah pesisir
 - Jumlah dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)
 - Jumlah dokumen Index Pembangunan Manusia (IPM)

Dari indikator tersebut diatas, dapat dilihat kondisi existing Bappeda Kota Banda Aceh sebagai berikut :

- **Basajan.** Kerjasama regional tiga daerah, Banda Aceh – Sabang – Jantho yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Walikota Banda Aceh, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 25 Tahun 2009 dan Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Regional (BKR) BASAJAN. Badan ini dibentuk untuk peningkatan pembangunan perekonomian antar daerah. Melalui kerjasama tiga daerah ini diharapkan akan menjadi suatu kekuatan ekonomi baru pada tahun 2020. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain bidang pariwisata, persampahan, air minum dan tata ruang.
- **Musrenbang.** Perencanaan pembangunan akan menjadi efektif pelaksanaannya jika dalam penyusunannya juga melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam identifikasi dan penentuan kebutuhan masyarakat akan pembangunan. Selama pelaksanaan

musrenbang yang dikoordinir oleh Bappeda telah mampu melibatkan masyarakat untuk berperan dalam musrenbang tingkat gampong. Namun tingkat keterlibatan masyarakat belumlah sampai pada tahap yang menggembirakan karena masih ada masyarakat yang berpandangan apatis terhadap keberhasilan musrenbang gampong menampung usulan masyarakat, tetapi kedepannya Bappeda akan terus berupaya meningkatkan kualitas musrenbang gampong sehingga dapat menampung sebagian besar usulan masyarakat. Selain itu Bappeda juga melaksanakan musrena, suatu wadah perencanaan pembangunan dengan melibatkan stakeholders utama dari kaum perempuan. Melalui musrena diharapkan kaum perempuan dapat lebih leluasa dalam menyampaikan aspirasi mereka.

- **Kapasitas Kelembagaan.** Sebagai badan perencana pembangunan, Bappeda terus berusaha meningkatkan kapasitas kelembagaan sebagai lembaga perencana. Kondisi existing kapasitas kelembagaan Bappeda belum sampai pada tahap yang memuaskan dalam pelaksanaan fungsi Bappeda sebagai perencana.
- **Ketersediaan dokumen perencanaan.** Bappeda kota Banda Aceh sudah menghasilkan dokumen perencanaan dan sudah diimplementasikan dalam proyek-proyek pembangunan. Dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan, yaitu :

Tabel 3.1
Dokumen yang telah dihasilkan

No	Dokumen	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2027 (RPJP)	√				
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012	√				
3	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	√	√	√	√	√
4	Arah dan Kebijakan Umum (AKU) / Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	√	√	√	√	√
5	Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)	√	√	√	√	√
6	Banda Aceh Dalam Angka	√	√	√	√	√
7	Profile Daerah Banda Aceh	√		√	√	
8	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	√	√	√	√	√
9	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	√		√		√
10	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)					

No	Dokumen	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
11	Data Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, PJSDA, Kesehatan, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kependudukan	√	√			
12	Data spatial GIS		√	√	√	√

3.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan, dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan.

Selama tahun 2011 Bappeda melaksanakan enam sasaran strategis, enam belas indikator kinerja, sembilan program, dan dua puluh lima kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan yang dijalankan selama satu tahun tersebut secara umum dapat dicapai dengan baik, namun ada satu kegiatan pencapaiannya tidak sesuai yang diharapkan. Sampai akhir Desember 2011 pencapaian realisasi fisik sebesar 96,43% dan keuangan 90,10%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Ada enam indikator kinerja yang ditetapkan dengan target pencapaian berupa bulan dan orang, yaitu :

- meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan target pencapaian selama 12 bulan. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.
- Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana dengan target pencapaian selama 12 bulan. Sampai 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.
- Meningkatnya jumlah perbaikan sarana dan prasarana dengan target pencapaian selama 12 bulan. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.
- Jumlah pakaian dinas harian pegawai dengan target pencapaian 63 orang. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.

-
- Keikutsertaan dalam diklat dengan target pencapaian selama 12 bulan. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas data/informasi pembangunan yang akurat

Ada dua indikator kinerja yang ditetapkan dengan target pencapaian berupa jumlah buku dan album peta, yaitu :

- Kegiatan Penyusunan Buku PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka indikator yang ditetapkan adalah 80 buku PDRB dan 80 buku Banda Aceh Dalam Angka. Sampai 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%
- Kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS) indikator yang ditetapkan adalah 2 eks album peta. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah nol persen. Hal terjadi karena ada sub kegiatan pada kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS) yang tidak terlaksana yaitu survey drainase zona 7 dan 8. Sampai akhir Desember 2011 sub kegiatan survey drainase zona 7 dan 8 tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu untuk dilaksanakan sementara sub kegiatan pengadaan citra satelit Kota Banda Aceh dapat dilaksanakan seratus persen.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga

Indikator kinerja yang ditetapkan dengan target pencapaian berupa jumlah lembaga, yaitu :

- Melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah sebanyak 3 lembaga. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya koordinasi dan musyawarah dalam penyelenggaraan penataan ruang

Indikator kinerja yang ditetapkan dengan target pencapaian berupa bulan, yaitu :

- Terlaksananya koordinasi dan musyawarah selama 12 bulan. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kualitas program perencanaan

Ada enam indikator kinerja yang ditetapkan dengan target pencapaian berupa orang, buku, SKPD, dan desa, yaitu :

- Pelaksanaan musrenbang yang diikuti oleh 200 orang. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.
- Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dihasilkan sebanyak 25 buku laporan monitoring, dan 25 buku laporan capaian RPJM. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.
- Terciptanya sinkronisasi program pembangunan dan plafon anggaran SKPD yang menjadi pedoman bagi 36 SKPD. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.
- Pelaksanaan P2KP di 90 desa. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.
- Pelaksanaan musrena yang diikuti oleh 450 orang. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.
- Pelaksanaan rapat kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh 36KSPD. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%.

Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas data IPM

Indikator kinerja yang ditetapkan dengan target pencapaian berupa bulan, yaitu :

- Jumlah buku IPM yang disusun sebanyak 60 buku. Sampai akhir 31 Desember target kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat secara keseluruhan realisasi kinerja Bappeda menunjukkan angka yang memuaskan, namun terdapat satu kegiatan yang realisasi kinerja nol persen yaitu kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS). Namun sebenarnya dalam kegiatan tersebut terdapat dua sub kegiatan yang dijalankan yaitu survey drainase zona 7 dan 8, dan pengadaan dan pengolahan citra satelit Kota Banda Aceh. Sampai akhir Desember 2011 sub kegiatan survey drainase zona 7 dan 8 tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu untuk dilaksanakan sementara sub kegiatan pengadaan citra satelit Kota Banda Aceh dapat dilaksanakan seratus persen.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Penyusunan APBD Tahun 2011 didasarkan pendekatan kinerja yang mengutamakan output, outcome dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efisien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran, sedangkan disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja, prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator jelas dan terukur.

Untuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pada tahun berjalan, maka perlu ditetapkan estimasi dan perkiraan realisasi kinerja program dalam bentuk indikator. Indikator tersebut ditetapkan berdasarkan besarnya kebutuhan anggaran yang dialokasikan kepada SKPD untuk menyusun dan melaksanakan program dalam rangka membangun, dan meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan publik. Sehingga setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terukur secara jelas kinerjanya. Realisasi atau capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu.

Selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2011 Bappeda menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup memuaskan. Sampai akhir Desember 2011 Bappeda dapat merealisasikan anggaran belanja tidak langsung 97,23%, sedangkan realisasi program dan kegiatan pada belanja langsung sebesar 96,43% untuk realisasi fisik dan 90,10% untuk realisasi keuangan. Adanya realisasi yang tidak tercapai 100% karena terdapat selisih harga nego serta tidak dilakukan penarikan karena ada kegiatan yang tidak cukup waktu untuk dilaksanakan. Secara umum realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda cukup baik dengan alokasi belanja bappeda sebesar Rp. 4.751.145.131,- dapat terserapnya anggaran sebesar Rp. 4.508.963.335,- atau 94,90% dari alokasi belanja Bappeda. Dimana belanja tidak langsung alokasi anggarannya sebesar Rp. 3.202.306.908,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 3.113.531.260,- atau 97,23%. Anggaran belanja tidak langsung yang tidak terealisasikan sebesar Rp. 88.775.648,- atau 2,77%, karena adanya pegawai yang mutasi ke SKPD lain sehingga terdapat kelebihan anggaran pada belanja gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. Sedangkan dari alokasi belanja langsung sebesar Rp. 1.548.838.223,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.395.432.075,- atau 90,10%. Anggaran belanja langsung yang tidak

terrealisasikan sebesar Rp. 153.406.148,- atau 9,90%, karena adanya selisih harga nego serta tidak dilakukan penarikan karena ada kegiatan yang tidak cukup waktu untuk dijalankan. Dimana dari total belanja langsung yang dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 555.225.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 508.115.332,- atau 91,52%, dan dari alokasi untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 734.911.828,- terealisasi sebesar Rp. 634.436.743,- atau 86,33% sedangkan dari alokasi untuk belanja modal sebesar Rp. 258.701.400,- dapat terealisasi sebesar Rp. 252.880.000,- atau 97,75%, hal ini menunjukkan Bappeda telah melaksanakan secara maksimal seluruh program/kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2011 walaupun ada satu kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Sedangkan realisasi fisik pencapaian target kinerja program dan kegiatan belanja langsung yang dilaksanakan sebesar 96,43%.

Kinerja Keuangan entitas pelaporan dalam laporan realisasi anggaran mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan kinerja keuangan entitas pelaporan yang meliputi penjelasan mengenai rencana untuk meningkatkan kinerja program.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui :

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran Tahun 2011

No	Belanja/Program	Rencana	Realisasi	%
1	Program Administrasi Perkantoran	466.911.627	398.190.198	85,28
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.167.500	134.405.000	92,59
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.400.000	24.156.000	99,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	19.000.000	76,00
5	Program pengembangan Data/Informasi	265.952.000	258.106.380	97,05
6	Program Kerja Sama Pembangunan	107.278.909	57.551.100	53,65

No	Belanja/Program	Rencana	Realisasi	%
7	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar	24.435.630	23.890.000	97,77
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	432.683.877	423.124.087	97,79
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	57.008.680	57.008.680	100
	Jumlah	1.548.838.223	1.395.431.445	90,10

Dari tabel tersebut dapat dilihat realisasi kinerja keuangan Bappeda tahun 2011 mencapai 90,10%, hanya tersisa 9,9% lagi yang tidak terealisasi. Tidak terealisasinya anggaran tersebut dikarenakan adanya selisih harga nego dan tidak ada lagi penarikan karena tidak ada kebutuhan serta ada anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sisa anggaran terdapat dari beberapa kegiatan, pada program administrasi perkantoran dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 466.911.627,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 398.190.198 atau 85,28%, anggaran yang tidak terealisasi lagi terdapat pada beberapa kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, kegiatan Makan Minum Harian Pegawai, dan Penyediaan/ Peningkatan Jasa Administrasi Kantor. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 145.167.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 134.405.000,- atau 92,59%, anggaran yang tidak terealisasi terdapat pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar Rp. 1.336.000,- yaitu untuk kegiatan belanja bahan bakar minyak karena adanya pengurangan kendaraan dinas roda dua yang hilang dan belanja surat tanda nomor kendaraan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 6000.000,- dari yang direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,-. Program Pengembangan Data/Informasi dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 265.952.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 258.106.380,- atau 97,05%, anggaran yang tidak direalisasikan lagi terdapat pada kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS) sebesar Rp. 7.845.620,- karena tidak terlaksananya kegiatan survei zona drainase. Program Kerja Sama Pembangunan dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 107.278.909,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 57.551.100,- atau 53,65%, anggaran yang tidak terealisasi terdapat pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga sebesar Rp. 49.727.809,-. Anggaran yang tidak

terrealisasikan yaitu pada pos Honorarium PNS untuk pembayaran honorarium tim teknis pelaksana CDIA sebesar Rp. 6.950.000,- , honorarium tim teknis Basajan Rp. 4.950.000,- serta honorarium tim teknis RTPP dan Pemantau RTPP Pasar Aceh sebesar Rp. 15.400.000,- dan pos honorarium Non PNS untuk kegiatan publik hearing CDIA sebesar Rp. 7.500.000,- dan pada pos belanja barang jasa sebesar Rp. 14.727.809,- tidak terealisasi karena kegiatan CDIA, BASAJAN dan RTPP Pasar Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada kegiatan CDIA disebabkan karena konsultan dari pusat belum datang karena proses bidding konsultan di Bappenas terhambat sehingga tim teknis yang dibentuk sebagai pendamping konsultan proyek CDIA tidak terealisasi anggarannya. Sedangkan pada kegiatan RTPP (Rencana Tindak Pemindehan Pedagang)/LARAP tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan mundurnya jadwal pencairan dana oleh World Bank karena belum lengkapnya berkas dokumen yang disyaratkan dan musyawarah dengan pedagang, baru dilaksanakan setelah ada kepastian konstruksi dilaksanakan dan kepastian selesainya bangunan pasar tersebut. Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 432.683.87,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 423.124.087,- atau 97,79%, anggaran yang tidak terealisasi terdapat pada beberapa kegiatan yaitu kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 852.000,-. Pada kegiatan Penunjang Pelaksanaan P2KP terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dimana sebesar Rp. 900.000,- tidak terealisasi merupakan sisa honorarium Geuchik Lampoh Daya dan adanya penyesuaian standar honorarium PNS untuk tim teknis tersisa sebesar Rp. 4.950.000,- sedangkan sisanya tidak terealisasi pada pos Propaganda dan Dokumentasi sebesar Rp. 150.000,- karena tidak ada kebutuhan lagi. Sementara beberapa kegiatan hampir seluruhnya dapat terealisasi anggarannya.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi antar Periode

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
2010	1.714.486.000	1.468.649.681	85,66
2011	1.548.838.223	1.395.432.075	90,10

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat realisasi keuangan Bappeda tahun 2011 untuk anggaran belanja langsung mencapai 90,10%, mengalami

kenaikan persentase dari tahun 2010 sebesar 4,44%. Dimana belanja yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 153.406.148,- atau 9,90% dari total anggaran belanja langsung karena adanya selisih harga nego, tidak ada penarikan karena ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

